



INDONESIA
INVESTMENT
COORDINATING
BOARD

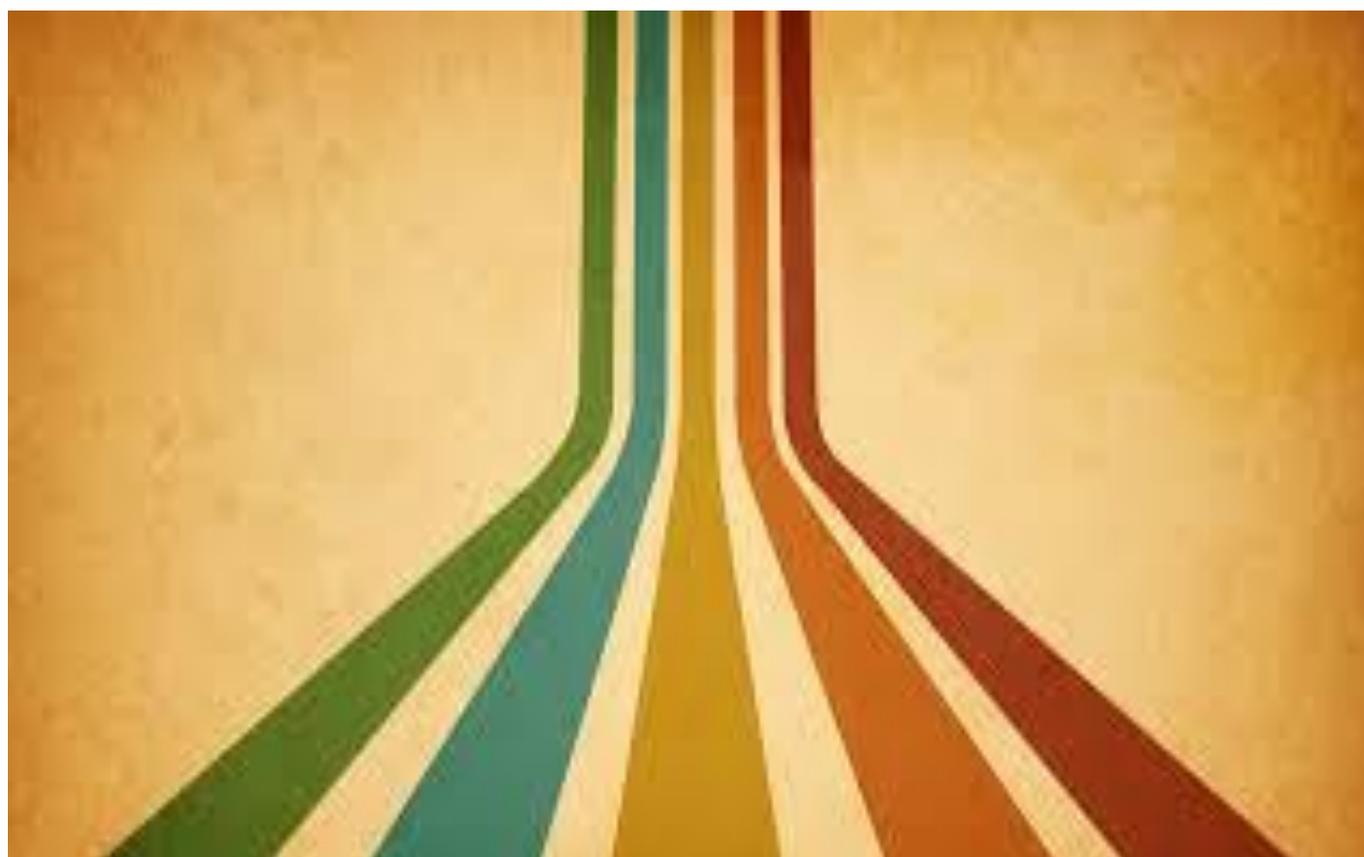


KEMENTERIAN KOPERASI
DAN UMKM
REPUBLIK INDONESIA



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RANHIR RENJA PD) TAHUN ANGGARAN 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
SUNGAILIAT
2024**



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan rencana kerja perangkat daerah dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penyusunan perencanaan pembangunan yang selaras dengan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan panduan dan arahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun yang berkenaan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);

21. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun secara teknokratis.
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPD dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

13. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).
16. Penganggaran berbasis program adalah konsep pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, yang mendukung prioritas nasional dan provinsi, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

BAB II

JANGKA WAKTU RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial serta mengacu prinsip Penganggaran berbasis program, berbasis hasil evaluasi capaian kinerja terhadap tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2025 serta mendukung pencapaian Tujuan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.
- (2) Rincian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MATERI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator, target, lokasi pelaksanaan kegiatan, pagu anggaran yang dibutuhkan serta sumber pendanaannya baik berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN maupun dari sumber-sumber lainnya.

BAB V
PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah membuat Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah secara triwulanan atas pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang realisasi kinerja dan keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan tersebut.
- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah.
- (4) Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi masukan dan bahan pertimbangan analisis serta evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Juli 2024
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M. HARIS AR

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Juli 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

ASMAWI ALIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, kasih dan karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2025 ini disusun dalam rangka perwujudan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta yang akan datang guna mencapai tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang lebih terarah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan suatu sistem Akuntabilitas yang memadai.

Lebih jauh Rencana Kerja PD ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (**Good Governance**) guna perwujudan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Dan semoga Laporan Rencana Kerja PD ini membawa manfaat positif bagi jajaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya serta Pemerintah Kabupaten Bangka sebagai stakeholdernya.

Sungailiat, 30 Juli 2024

**Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten
Bangka**



**DIAN FIRNANDY, SE
NIP. 197912182008041001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

| | |
|----------------------------------|---|
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 4 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 8 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 9 |

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU

| | |
|---|----|
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah | 10 |
| 2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan | 40 |
| 2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan | 40 |
| 2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja | 46 |
| 2.1.4. Faktor-faktor Penyebab tidak Tercapainya/Melebihi Target Kinerja | 46 |
| 2.1.5. Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra | 46 |
| 2.1.6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk Mengatasi Faktor-faktor Penyebab | 50 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 51 |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 51 |
| 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... | 56 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | 80 |

| | |
|---|----|
| BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | |
| 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional | 80 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah | 82 |
| 3.2.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perangkat Daerah | 83 |
| 3.2.2. Strategi, Kebijakan, Indikator Sasaran, Program dan Capaian Program | 83 |
| 3.3. Program dan Kegiatan | 86 |
| BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | |
| BAB V. PENUTUP..... | 92 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam mendukung tugas Bupati pada urusan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bangka melalui Sekretaris Daerah.

Pada tahun 2025 DINPMP2KUKM menetapkan tujuan organisasi dan secara bertahap memperbaiki dan menyesuaikan tujuan, sasaran dan kebijakan organisasi guna menyelaraskan dengan visi dan misi Kabupaten Bangka

Agar dapat berjalan dengan bertanggungjawab dan sesuai dengan aturan yang ada, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan, membina, mengoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Dalam

melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan promosi potensi daerah, kerjasama penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
2. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan potensi dan peluang Daerah;
3. Menyelenggarakan pelayanan perizinan/non perizinan yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maupun pelayanan perizinan/non perizinan yang didelegasikan kewenangannya oleh Bupati kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
4. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan otomasi pengolahan data, pelaporan dan pengarsipan dokumen, sistem informatika untuk pelayanan investasi, perizinan/non perizinan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
5. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan pelayanan perizinan/non perizinan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
6. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelayanan perizinan/non perizinan, penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
7. Menyelenggarakan analisa hukum, pengaduan dan kepuasan masyarakat di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan/Non Perizinan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);

- a. UU No. 25 Tahun 2007 pasal 4 meliputi upaya mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, koperasi, usaha kecil dan menengah dalam rangka penguatan daya saing perekonomian Nasional yaitu mempercepat peningkatan penanaman modal serta memberikan perlakuan yang sama bagi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 yang telah melakukan pembagian urusan pemerintahan kepada Kabupaten/Kota di bidang penanaman modal.

Sebagai salah satu proses perencanaan terpadu dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka, maka dibutuhkan perencanaan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menggambarkan rencana kerja dari OPD yang bersangkutan setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka strategi pembangunan dengan indikator yang terukur.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);

25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 98 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka;
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 24);
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk dijadikan Alat koordinasi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka yang dibiayai dari sumber APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, DAK.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Untuk menggambarkan tujuan, sasaran, indikator sasaran, target, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.

- b. Untuk membangun koordinasi perencanaan penanaman modal yang efektif dalam kerangka sinergitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian penanaman modal.
- c. Untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang sesuai dengan Standar Operasional Procedure (SOP).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - 2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - 2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja Hasil /Keluaran yang direncanakan
 - 2.1.4. Faktor-faktor Penyebab tidak Tercapainya/Melebihi Target Kinerja
 - 2.1.5. Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra
 - 2.1.6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk Mengatasi Faktor-faktor Penyebab Tersebut
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
 - 3.2.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
 - 3.2.2. Strategi, Kebijakan, Indikator Sasaran, Program dan Capaian Program
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rekapitulasi hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam Tabel T-C.29

Berdasarkan Formulir Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pelaksanaan Tahun Anggaran 2024.

TABEL TC. 29

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Terhadap RKPD

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangka

Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

| No | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|---------|------|-------------------------------|--|---|--|--|---------------------------------|------|------|------|---|--|--|--|------|
| | | | | | | | | I | II | III | IV | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = 7 + 13 | 15 = 14/6 x 100% | 16 | |
| | | | | | | K Rp | K Rp | K Rp | K Rp | K Rp | K Rp | K Rp | K Rp | K Rp | K Rp | K Rp |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------|---|--------|---|--|-----------------|----------------|--|-----------------|---------------|---------------|---|--------------|--|---------------------|--------------|--|---|--------------|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|
| | | 2 | # | | | | URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KOPERASI ,USAHA KECIL DAN MENENGA H | | 873.73 9.100 | | | 600.85 8.600 | | | - | | | 253.1 00.99 7 | | | - | | - | | 253.1 00.99 7 | | 253.1 00.99 7 | | 28, 97 | |
| 1 | Meningka tanya Koperasi Berklasifi kasi A | 2 | # | 0 3 | | | PROGRAM PENGAWA SAN DAN PEMERIKS AAN KOPERASI | Persenta se Peningka tan Jumlah Koperasi Yang Berklasifi kasi A (%) | 45 ,0 0 | 91.000 .000 | | 45 ,0 0 | 8.000. 000 | 0, 00 | - | 0, 0 0 | | 4.205. 000 0 | 0, 0 0 | | - | 0, 0 0 | | - | 0, 00 | 4.205. 000 0 | 0, 00 | 4.205. 000 0 | 0, 00 | 4,6 2 |
| | | 2 | # | 0 3 | 2 | 0 1 | PeKegiata n meriksaan dan Pengawas an Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi | Persenta se Pembina an Koperasi (%) | 86 ,0 0 | 91.000 .000 | | 86 ,0 0 | 8.000. 000 | 21 ,5 0 | - | 0, 0 0 | | 4.205. 000 0 | 0, 0 0 | | - | 0, 0 0 | | - | 21 ,5 0 | 4.205. 000 0 | 21 ,5 0 | 4.205. 000 0 | 25 ,0 0 | 4,6 2 |

| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | S | R | SR | S | R | R | S | R | S | R | S | R | R | S | R | S | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|---|--|--|----------------------------|------------|------------|----|-------|-----------|-----------|------|------|------|---|---|---|------|---|---|------|-------|---|---|---|-------|--|---|------|-------|
| 2 | Meningkatnya Koperasi Berklasifikasi A | 2 | # | 0 | 4 | | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP KOPERASI | Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berklasifikasi A (%) | 45,00 | 34.739.100 | | | 45,00 | 3.000.000 | 0,00 | | - | 0,00 | | | - | 0,00 | | | - | 0,00 | | | - | 0,00 | | | - | 0,00 |
| | | 2 | # | 0 | 4 | 2 | 0 | Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota | Persentase Pembinaan Koperasi (%) | 86,00 | 34.739.100 | | | 86,00 | 3.000.000 | 21,50 | | - | 0,00 | | | - | 0,00 | | | - | 21,50 | | | - | 21,50 | | | - | 25,00 |
| | | 2 | # | 0 | 4 | 2 | 0 | 00 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi | Jumlah Unit Usaha Koperasi | 20 | 34.739.100 | | | 20 | 3.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 0,00 | | | 0,00 | 0 | 0 | - | 0 | | | - | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|---|--------|---|--------|---|---|---------------|-----------------|--|---------------|-----------------|---------------|---|--------------|-----------------|--------------|---|--------------|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|----|--------|----|
| | | | | | | | Koperasi Kewenanga n Kabupaten Kota | yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0, 00 | 0,00 | 0, 0 0 | 0,00 | 0, 0 0 | 0,00 | 0, 0 0 | 0, 0 0 | 0,00 | 0, 0 0 | 0,00 | 0, 0 0 | 0, 0 0 | 0, 0 0 | 0,00 | 0, 0 0 | 0, 0 0 | 0,00 | 0, 0 0 | | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S R | SR | S R | SR | S R | SR | S R | SR | S R | SR | S R | SR | S R | SR | S R | SR | S R | SR | S R | SR | S R | SR | S R | SR | S R | SR | S R | SR | S R | SR | S R | SR | S R | SR | S R | SR |
| 3 | Meningkatnya Koperasi Berklasifikasi A | 2 | # | 0 5 | 2 | 0 1 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berklasifikasi A (%) | 45 ,0 0 | 235.00 0.000 | | 45 ,0 0 | 281.34 6.300 | 0, 00 | - | 0, 0 0 | 248.07 5.997 | 0, 0 0 | - | 0, 0 0 | - | 0, 00 | 248.07 5.997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | # | 0 5 | 2 | 0 1 | Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten | Persentase Pembinaan Koperasi (%) | 86 ,0 0 | 235.00 0.000 | | 86 ,0 0 | 281.34 6.300 | 25 ,0 0 | - | 0, 0 0 | 248.07 5.997 | 0, 0 0 | - | 0, 0 0 | - | 25 ,0 0 | 248.07 5.997 | 25 ,0 0 | 248.07 5.997 | 29 ,0 7 | 248.07 5.997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|----|-------------|-----------|----|--------|--|--|----|-------------|------|-------------|------|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | # | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub | Jumlah | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | | 1 | 01 | Kegiatan | SDM Yang | | 235.00 | | | 70 | 281.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Peningkata | Memaham | | 0.000 | | | | 6.300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | n | i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pemahama | Pengetahu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | an dan | an | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pengetahua | Perkopera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | n | sian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Perkoperasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | an serta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Kapasitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SDM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Koperasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | SR | | SR | | SR | | T | | SR | | SR | | SR | | SR | | T | | SR | | SR | | SR | | SR |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|----|---|---|----|----------------|--|--|----|-----------------|----------|----------|------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|---|----------------|---|----------------|----------|---|
| | | 2 | # | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pemberday aan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha Yang Telah Melaksana kan Kemitraan Usaha Mikro | 5 | 15.000. 000 | | | 5 | 3.000.0 00 | 0, 00 | 0, 00 | - | 0, 00 | 0, 00 | - | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | - | 0 | - | 0, 00 | 0 |
| | | 2 | # | 0 | 3 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pemulihan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitas i | 1 | 18.000. 000 | | | 1 | 3.000.0 00 | 0, 00 | 0, 00 | - | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | - | 0 | - | 0, 00 | 0 | |
| | | 2 | # | 0 | 4 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pemahaman dan Pengetaha n UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausah aan melalui Pendidikan | Jumlah SDM yang Memaham i Pengetahu an Usaha Mikro dan Kewirausa haan | 60 | 95.000. 000 | | | 60 | 299.51 2.300 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 28.250 .000 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0 | 28.250 .000 | 0 | 28.250 .000 | 0, 00 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----|--|--|---|--|-------|---------------|-------------|-------|---------------|------|-------------|-------------|---------------|-------------|------|------|------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | | | | | | | | | | | 600.858.600 | - | 253.100.997 | - | - | 253.100.997 | 253.100.997 | 253.100.997 | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (%) | | | | | | | | | | | | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | | | | | | | | | | | | | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR |
| | | 2 | # | | | | URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL | | | 8.476.144.900 | | | 9.072.513.496 | | 651.893.653 | | 2.987.406.431 | | - | | - | | 3.639.300.084 | | 3.639.300.084 | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah | 2 | # | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30) | 25,00 | 7.331.744.900 | | 25,25 | 6.025.031.965 | 0,00 | 630.070.550 | 0,00 | 2.781.323.970 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 3.411.394.520 | 0,00 | 3.411.394.520 | 0,00 | 3.411.394.520 | 0,00 | 3.411.394.520 | 0,00 | 3.411.394.520 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----|---|----|----|---|-------|------------|--|-------|------------|-------|---|------|-----------|-----------|------|------|------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | | | | | | | | Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur | 87,50 | | | 87,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | # | 01 | 2 | 01 | | Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | 30.000.000 | | 100 | 11.600.200 | 50,00 | - | 0,00 | 1.114.000 | 0,00 | - | 0,00 | - | 50,00 | 1.114.000 | 50,00 | 1.114.000 | 50,00 | | |
| | | | | | | | | Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar | 100 | | | 100 | | 50,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 2 | # | 01 | 2 | 01 | 00 | Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 8 | 15.000.000 | | 8 | 2.609.200 | 50,00 | 4 | - | 0,00 | 1.114.000 | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 | 4 | 1.114.000 | 4 | 1.114.000 | 50,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------|--------|--------|----------|--|---|---------|-------------------|--|--|---------|-------------------|---------------|---|-----------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|--------------|--|---------------|---------------|---|---|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------|
| Tersedia nya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 | # | 0 1 | 2 1 | 0 1 | 00 06 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD dan Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 | 15.000. 000 | | | 4 | 8.991.0 00 | 50 ,0 0 | 2 | - | 0, 0 0 | | - | 0, 0 0 | | 0, 0 0 | | 50 ,0 0 | 2 | - | 2 | - | 50 ,0 0 | 0 | | | |
| | 2 | # | 0 1 | 2 2 | 0 2 | | Kegiatan Administra si Keuangan | Persentas e Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar (%) | 10 0 | 5.668.0 00.000 | | | 10 0 | 4.834.6 66.727 | 21 ,4 3 | | 522.08 0.400 | 0, 0 0 | | 2.275. 838.18 0 | 0, 0 0 | | 0, 0 0 | | - | 21 ,4 3 | | - | 21 ,4 3 | 2.797. 918.58 0 | 21 ,4 3 | 2.797. 918.58 0 | 21 ,4 3 | 4 3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|---|----|------|---|---|-----|---------------|--|--|----|---------------|-------|---|-------------|------|---------------|------|------|--|-------|---|---------------|---|---------------|------|-----|
| Tersedia Gaji dan Tunjangan ASN | 2 | # | 01 | 3 | 02 | 0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan) | 114 | 5.640.000.000 | | | 36 | 4.823.634.727 | 8,33 | 3 | 522.080.400 | 0,00 | 2.274.228.180 | 0,00 | 0,00 | | 8,33 | 3 | 2.796.308.580 | 3 | 2.796.308.580 | 2,63 | 4,5 |
| Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 2 | # | 01 | 2 | 2 | 0003 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 36 | 18.000.000 | | | 12 | 1.300.000 | 25,00 | 3 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | 25,00 | 3 | - | 3 | - | 8,33 | 0 |
| Tersedia Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ | 2 | # | 01 | 3 | 02 | 0007 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD | 42 | 10.000.000,00 | | | 14 | 9.732.000,00 | 21,43 | 3 | - | 0,00 | 1.610.000 | 0,00 | 0,00 | | 21,43 | 3 | 1.610.000 | 3 | 1.610.000 | 7,14 | 1 |

| | | | | | | | Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian (%) | 100 | | | 100 | | 25,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 25,000 | | 25,000 | | 100 | | |
|--|---|---|----|---|----|----|--|--|----|---------------|-----|--|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---|--------|---|-------|---|-------|
| | 2 | # | 01 | 2 | 05 | 00 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta atribut | 6 | 12.600.000 | | | 1 | 9.250.000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | - | 0,000 | - | 0,000 |
| | 2 | # | 01 | 2 | 05 | 00 | Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | 11 | 36.500.000,00 | | | 0 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | - | 0,000 | - | 0,000 |
| | 2 | # | 01 | 2 | 05 | 00 | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi | Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 | 25.000.000,00 | | | 1 | 6.450.000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | - | 0,000 | - | 0,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|----|---|---|-----|-------------|--|--|-----|----------------|-------|---------------|------|------------|------|------|------|-------|-------|------------|-------|------------|-------|---|
| | 2 | # | 0 | 2 | 0 | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah | 100 | 247.644.900 | | | 100 | 127.088.336 | 25,00 | 13.917.300 | 0,00 | 78.932.922 | 0,00 | - | 0,00 | - | 25,00 | 92.850.222 | 25,00 | 92.850.222 | 25,00 | 3 |
| | 2 | # | 0 | 2 | 0 | 00 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 36 | 247.644.900 | | | 12 | 127.088.336,00 | 25,00 | 13.917.300,00 | 0,00 | 78.932.922 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 3 | 92.850.222 | 3 | 92.850.222 | 8,33 | 3 |
| | 2 | # | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 36 | 30.000.000 | | | 12 | 24.503.811 | 25,00 | 2.295.600 | 0,00 | 14.768.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 3 | 17.063.600 | 3 | 17.063.600 | 8,33 | 5 |
| | 2 | # | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 36 | 36.000.000 | | | 0 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0 | - | 0,00 | 0 |

| | | | | | | an Daerah | sesuai peraturan (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------|--------|----|--|---|----|-----------------|--|--|----|-----------------|---------|---|----------------|---------|--|-----------------|---------|--|---------|--|---------|---|-----------------|---|-----------------|----------|---|
| | 2 | # | 0 1 | 2 8 | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 36 | 795.00 0.000 | | | 12 | 561.65 6.489 | 25 0 | 3 | 65.980 .650 | 0, 0 | | 295.04 0.850 | 0, 0 | | 0, 0 | | 25 0 | 3 | 361.02 1.500 | 3 | 361.02 1.500 | 8, 33 | 4 |
| | 2 | # | 0 1 | 2 8 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n (Laporan) | 36 | 125.00 0.000 | | | 12 | 224.71 0.200 | 25 0 | 3 | 5.900. 800 | 0, 0 | | 53.007 .744 | 0, 0 | | 0, 0 | | 25 0 | 3 | 58.908 .544 | 3 | 58.908 .544 | 8, 33 | 4 |
| | 2 | # | 0 1 | 2 8 | 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka | 36 | 73.000. 000 | | | 12 | 46.743. 071 | 25 0 | 3 | 4.791. 200 | 0, 0 | | 14.808 .000 | 0, 0 | | 0, 0 | | 25 0 | 3 | 19.599 .200 | 3 | 19.599 .200 | 8, 33 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|----|---|--|-----|--|--|-----|---------------|------|-------|------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|---|------|------|---|------|--|------|---|
| | 2 | # | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 3 | | | 1 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 9 | | 09 | | | | | | | 36.000.000 | | | 20.450.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 17,70 | | 10,46 | 0,00 | | 46,16 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 17,70 | | 56,62 | | | 9,81 | 4 | | | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | S R | | SR | S R | | SR | S R | | S R | S R | | S R | S R | | R | | | S R | S | | | | |
| 2 | Meningkatnya Promosi Penanaman Modal Daerah | 2 | # | 0 | 2 | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Persentase Jumlah Investor | 100 | | | 100 | 36.000.000 | | | 5.000.000 | 0,00 | | - | 0,00 | | - | 0,00 | | - | 0,00 | | - | 0,00 | | - | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | | 2 | # | 0 | 2 | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota | Persentase Koordinasi Untuk Lembaga Daerah | 100 | | | 100 | 36.000.000 | | | 5.000.000 | 0,00 | | - | 0,00 | | - | 0,00 | | - | 0,00 | | - | 0,00 | | - | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | | 2 | # | 0 | 2 | 00 | Penyusunan Peta Potensi dan Peluang | Jumlah Dokumen Peta Potensi | 2 | | | 1 | 36.000.000,00 | | | 5.000.000 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | - | 0,00 | | - | 0,00 | 0 | - | 0 | | - | 0,00 | | 0,00 | 0 |

| | | | | | | | | Usaha kabupaten / Kota | Investasi Kabupaten /Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|---|----|----|---|---|-------------------------------|------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | S R | SR | S R | SR | S R | S R | S R | S R | S R | S R | SR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Meningkatnya Promosi Penanaman Modal Daerah | 2 | # | 03 | | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Persentase Jumlah Investor | 100 | 85.880.000 | | | 100 | 10.000.000 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| | | 2 | # | 03 | 2 | 01 | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota | Persentase Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal yang difasilitasi | 100 | 85.880.000 | | | 100 | 10.000.000 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| | | 2 | # | 03 | 2 | 01 | 02 | Sub Kegiatan Pelaksanaan | Jumlah Dokumen Hasil | 3 | 85.880.000 | | | 1 | 10.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|----|--|--|---|--|-----|-------------|--|--|-----|-------------|------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------------|------|------------|------|--|--|--|------|---|--|--|--|---|
| | | | | | | | Risiko | melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | | | | | | | 0,00 | 2 | | | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | | | | | | | SR | S | | | | |
| 5 | Meningkatnya Pendalian Penanaman Modal Daerah | 2 | # | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi | 100 | 458.520.000 | | | 100 | 615.478.000 | 0,00 | 6.996.958 | 0,00 | 70.034.218 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 77.031.176 | 0,00 | 77.031.176 | 0,00 | | | | | | | | | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|----|---|---|-------|---------------|--|--|-------|-------------|-------|---|-----------|------|--|------------|------|--|--|------|--|--|-------|---|------------|------|------------|------|---|
| | 2 | # | 0 | 2 | 0 | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten / Kota | Persentase Peningkatan Investasi | 50,00 | 458.520.000 | | | 83,00 | 615.478.000 | 0,00 | | 6.996.958 | 0,00 | | 70.034.218 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 77.031.176 | 0,00 | 77.031.176 | 0,00 | |
| | 2 | # | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya | 50 | 38.000.000,00 | | | 10 | 92.321.000 | 20,00 | 2 | - | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 20,00 | 2 | - | 2 | - | 4,00 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|----|-----------|--------------|----|---------|--|----|--------|----|---|--|----|--|--|--|--|----|---|--|----|--|----|---|--|--|--|--|
| | | | 2 | # | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub | Jumlah | 20 | | | 26 | | 25 | 6 | | 0, | | | | | 25 | 6 | | 66 | | 33 | 9 | | | | |
| | | | | | 5 | | 1 | 05 | Kegiatan | Pelaku | 0 | 342.52 | | 4 | 338.51 | ,0 | 6 | | 0, | | | | | ,0 | 6 | | 66 | | ,0 | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | Bimbingan | Usaha | | 0.000,0 | | | 4.000 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | Teknis | yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | kepada | Mengikuti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Pelaku | Bimbingan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Usaha | Teknis/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Sosialisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Implement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | asi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Perizinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Berusaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Berbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Risiko dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Pengawas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | an | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Perizinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Berusaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Berbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Risiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | # | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub | Jumlah | 50 | | | 50 | | 24 | 1 | | 0, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | | 1 | 06 | Kegiatan | Kegiatan | | 78.000. | | | 184.64 | ,0 | 2 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Pengawas | Usaha dari | | 000,00 | | | 3.000 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | an | Pelaku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Penanaman | Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Modal | yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Telah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Dianalisa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Diverifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Data, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Profil dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Informasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Usaha dari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Pelaku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|----|---|----|----|---|--|-----|------------|--|--|-----|-----------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|---|-------------|----------|
| | 2 | # | 06 | 2 | 01 | | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Persentase Pelayanan Perizinan Kepada Semua Lapisan Masyarakat yang dilakukan | 100 | 15.000.000 | | | 100 | 4.938.125 | 25,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 25,00 | - | 25,00 | - | 25,00 | 0 | | | |
| | 2 | # | 06 | 2 | 01 | 00 | Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 6 | 15.000.000 | | | 6 | 4.938.125 | 33,33 | 2 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 2 | - | 2,00 | - | 33,33 | 0 | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | 33,3 | | 0,00 | 33,3 | 0,00 | | | 33,3 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|-----------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | 3 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | 3 |
| Predikat Kinerja | S R | | SR | S R | | SR | S R | S R | S R | S R | | SR | S R |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL | 9.072.5 13.496 | | 651.89 3.653 | | 2.987. 406.43 1 | | - | | - | | 3.639. 300.08 4 | 3.639. 300.08 4 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Bidang Urusan Penanaman Modal (%) | 14 ,8 1 | | 7,19 | 0, 0 0 | 32,93 | 0, 0 0 | 0, 0 0 | 0, 0 0 | 0, 0 0 | 14 ,8 1 | 40,11 | | 10 ,5 8 |
| Predikat Kinerja Seluruh Program Bidang Urusan Penanaman Modal | S R | | SR | S R | | SR | S R | S R | S R | S R | | SR | S R |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN, KOPERASI DAN UMKM | 9.673.3 72.096 | | 651.89 3.653 | | 3.240. 507.42 8 | | - | | - | | 3.892. 401.08 1 | 3.892. 401.08 1 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UMKM (%) | 11 ,2 8 | | 6,74 | 0, 0 0 | 33,50 | 0, 0 0 | 0, 0 0 | 0, 0 0 | 0, 0 0 | 11 ,2 8 | 40,24 | | 10 ,3 2 |
| Predikat Kinerja Seluruh Program Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UMKM | S R | | SR | S R | | SR | S R | S R | S R | S R | | SR | S R |
| Faktor Pendorong : Keberhasilan Kinerja | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor Penghambat : Pencapaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten berikutnya*): | | | | | | | | | | | | | |

*) Diisi oleh
Kepala
Bappeda

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, rencana pencapaian target program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan tahun 2023 yang diukur melalui indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output). Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan selanjutnya di evaluasi pada setiap 4 (empat) triwulan selama satu tahun.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 pencapaian target Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2023 Pencapaian Target Kinerja, ditargetkan 100%.

Pencapaian target kinerja program tersebut didasarkan pada pelaksanaan 6 (enam) kegiatan, di tahun 2023 yaitu:

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 85,06 % sampai

dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review).

- 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 95,66 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review).
- 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 97,68 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review).
- 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 87,80 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review).
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 98.08 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review).
- 1.6. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 91.41 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat dilihat setelah ada review).
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 97.08 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review).

B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Berdasarkan target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 pencapaian target

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal sampai dengan tahun 2023 Pencapaian Target Kinerja , ditargetkan 100%.

Pencapaian target kinerja program tersebut didasarkan pada pelaksanaan 1 (satu) kegiatan, di tahun 2023 yaitu:

- 1.1. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 97,91 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review).

C. Program Promosi Penanaman Modal

Berdasarkan target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 pencapaian target Program Promosi Penanaman Modal sampai dengan tahun 2023 ditargetkan 100 %.

Pencapaian target kinerja program tersebut didasarkan pada pelaksanaan 1 (satu) kegiatan pada tahun 2023 yaitu :

- 1.1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 100 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review).

D. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Berdasarkan target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 pencapaian target Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sampai dengan tahun 2023 ditargetkan 100 %.

Pencapaian target kinerja program tersebut didasarkan pada pelaksanaan 1 (satu) kegiatan pada tahun 2023 yaitu :

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2025

- 1.1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran masih 90.97 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review).

E. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Berdasarkan target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 pencapaian target Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi tahun 2023 ditargetkan 100%.

Pencapaian target kinerja program tersebut didasarkan pada pelaksanaan 1 (satu) kegiatan pada tahun 2023 yaitu :

- 1.1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Realisasi Kinerja SKPD dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 95,35 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review).

F. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Berdasarkan target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 pencapaian target Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi sampai dengan tahun 2023 ditargetkan 100%

Pencapaian target kinerja program tersebut didasarkan pada pelaksanaan 1 (satu) kegiatan pada tahun 2023 yaitu :

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2025

1.2. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 90,72 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review).

G. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Berdasarkan target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 pencapaian target Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian sampai dengan tahun 2023 ditargetkan 100 %.

Pencapaian target kinerja program tersebut didasarkan pada pelaksanaan 1 (satu) kegiatan pada 2023 yaitu :

1.1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 97,14 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review).

H. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Berdasarkan target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 pencapaian target Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) sampai dengan tahun 2023 ditargetkan 100 %.

Pencapaian target kinerja program tersebut didasarkan pada pelaksanaan 1 (Satu) kegiatan pada tahun 2023 yaitu :

1.1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 69,84 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review).

I. Program Pengembangan UMKM

Berdasarkan target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 pencapaian target Program Pengembangan UMKM pada tahun 2023 ditargetkan 100 %.

Pencapaian target kinerja program tersebut didasarkan pada pelaksanaan 1 (satu) kegiatan pada tahun 2023 yaitu :

1.1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil, dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 93,68 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review).

J. Program Pelayanan Penanaman Modal

Berdasarkan target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 pencapaian target Program Pelayanan Penanaman Modal sampai dengan tahun 2023 ditargetkan 100 %.

Pencapaian target kinerja program tersebut didasarkan pada pelaksanaan 1 (satu) kegiatan pada tahun 2023 yaitu :

1.1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 86,38 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review).

K. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Berdasarkan target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2025 pencapaian target Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sampai dengan tahun 2023 ditargetkan 100 %.

Pencapaian target kinerja program tersebut didasarkan pada pelaksanaan 1 (satu) kegiatan pada tahun 2023 yaitu :

1.2. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja dan anggaran 93,99 % sampai dengan laporan ini dibuat. (Akan dapat terlihat setelah ada review)

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja

Untuk realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja tidak ada.

2.1.4. Faktor – faktor Penyebab tidak Tercapainya/Melebihi Target Kinerja :

Untuk faktor-faktor penyebab tidak tercapainya/melebihi target kinerja tidak ada.

2.1.5. Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra.

Terhadap capaian program Renstra maka implikasi yang timbul akibat adanya program yang tidak memenuhi target, maka kinerja Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2025

Renstra OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 tidak dapat mencapai 100%, oleh karenanya untuk target Renstra periode berikutnya akan menjadi pertimbangan untuk di rencanakan kembali kelanjutan program yang dimaksud. Realisasi dan Capaian Program Kegiatan DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.1
ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM KEGIATAN DINPMP2KUKM KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | | |
|----|--|------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | CAPAIAN REALISASI | PERSENTASE CAPAIAN | SISA ANGGARAN |
| 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 |
| A. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | Rp 2.845.424.500 | Rp 2.100.718.594 | 73,83 | Rp 744.705.906 |
| B. | BELANJA LANGSUNG | Rp 313.916.400 | Rp 269.418.556 | 93,02 | Rp 44.497.844 |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Rp 6.388.608.591 | Rp 5.726.227.568 | 93,25 | Rp 662.381.023 |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 25.597.500 | Rp 21.414.700 | 85,06 | Rp 4.182.800 |
| | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD | Rp 5.000.000 | Rp 4.205.000 | 84,10 | Rp 795.000 |
| | - Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD | Rp 4.685.000 | Rp 4.179.500 | 89,21 | Rp 505.500 |
| | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP | Rp 15.912.500 | Rp 13.030.200 | 81,89 | Rp 2.882.300 |
| NO | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | | |
| | | | CAPAIAN REALISASI | PERSENTASE CAPAIAN | SISA ANGGARAN |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp 4.683.693.094 | Rp 4.081.567.072 | 95,66 | Rp 602.126.022 |
| | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp 4.658.459.654 | Rp 4.056.350.632 | 87,07 | Rp 602.109.022 |
| | - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Rp 15.233.440 | Rp 15.233.440 | 100,00 | Rp 0,00 |
| | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Rp 10.000.000 | Rp 9.983.000 | 99,83 | Rp 17.000 |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp 23.379.630 | Rp 22.929.630 | 97,68 | Rp 450.000 |

| | | | | | |
|------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| | - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Rp 9.700.000 | Rp 9.250.000 | 95,36 | Rp 450.000 |
| | - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Rp 13.679.630 | Rp 13.679.630 | 100,00 | Rp 0,00 |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 394.223.418 | Rp 385.759.344 | 87,80 | Rp 8.464.074 |
| | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp 365.543.418 | Rp 363.949.893 | 99,56 | Rp 1.593.525 |
| | - Penata Usaha Arsip Dinamis pada SKPD | Rp 28.680.000 | Rp 21.809.451 | 76,04 | Rp 6.870.549 |
| 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp 102.051.680 | Rp 99.930.000 | 98,08 | Rp 2.121.680 |
| | - Pengadaan Mebel | Rp 30.489.180 | Rp 30.030.000 | 98,49 | Rp 459.180 |
| | - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp 71.562.500 | Rp 69.900.000 | 97,68 | Rp 1.662.500 |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 968.993.269 | Rp 932.921.873 | 91,41 | Rp 36.071.396 |
| | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp 777.504.500 | Rp 771.986.159 | 99,29 | Rp 5.518.341 |
| | - Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | Rp 123.324.540 | Rp 93.172.308 | 75,55 | Rp 30.152.232 |
| | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp 68.164.229 | Rp 67.763.406 | 99,41 | Rp 400.823 |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 190.670.000 | Rp 181.704.949 | 97,08 | Rp 8.965.051 |
| | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp 153.410.000 | Rp 145.064.949 | 94,56 | Rp 8.345.051 |
| | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp 16.810.000 | Rp 16.550.000 | 98,45 | Rp 260.000 |
| | - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp 20.450.000 | Rp 20.090.000 | 98,24 | Rp 360.000 |
| II | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Rp 87.249.458 | Rp 85.425.531 | 97,91 | 1.823.927 |
| 1 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota | Rp 87.249.458 | Rp 85.425.531 | 97,91 | Rp 1.823.927 |
| NO | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | | |
| | | | CAPAIAN REALISASI | PERSENTASE CAPAIAN | SISA ANGGARAN |
| | - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota | Rp 87.249.458 | Rp 85.425.531 | 97,91 | Rp 1.823.927 |
| III | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Rp 63.569.920 | Rp 63.569.920 | 100,00 | Rp 4.432.220 |
| 1 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota | Rp 63.569.920 | Rp 63.569.920 | 100,00 | Rp 0,00 |
| | - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Rp 63.569.920 | Rp 63.569.920 | 100,00 | Rp 0,00 |

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2025

| | | | | | |
|-------------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| IV | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Rp 689.611.938 | Rp 598.901.978 | 86,38 | Rp 54.709.960 |
| 1 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah kabupaten / Kota | Rp 689.611.938 | Rp 598.901.978 | 86,38 | Rp 54.709.960 |
| | - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Rp 651.235.238 | 568.034.578 | 92,33 | Rp 47.200.660 |
| | - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Rp 38.376.700 | Rp 30.867.400 | 80,43 | Rp 7.509.300 |
| V | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Rp 464.444.000 | Rp 410.101.503 | 90,97 | Rp 54.342.497 |
| | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota | Rp 464.444.000 | Rp 410.101.503 | 90,97 | Rp 54.342.497 |
| | - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK NON FISIK DAN APBD) | Rp 36.644.000 | Rp 35.964.103 | 98,14 | Rp 679.897 |
| | - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK NON FISIK DAN APBD) | Rp 342.520.000 | Rp 299.712.400 | 87,50 | Rp 42.807.600 |
| | - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Rp 85.280.000 | Rp 74.425.000 | 87,27 | Rp 10.855.000 |
| VI | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Rp 9.700.000 | Rp 9.250.000 | 95,35 | Rp 450.000 |
| 1 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota | Rp 9.700.000 | Rp 9.250.000 | 95,35 | Rp 450.000 |
| | - Pengawasan Kekuatan Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Rp 9.700.000 | Rp 9.250.000 | 95,35 | Rp 450.000 |
| VII | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Rp 222.476.500 | Rp 216.116.081 | 97,14 | Rp 6.360.419 |
| NO | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | | |
| | | | CAPAIAN REALISASI | PERSENTASE CAPAIAN | SISA ANGGARAN |
| 1 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota | Rp 222.476.500 | Rp 216.116.081 | 97,14 | Rp 6.360.419 |
| | - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi - (DAK NON FISIK) | Rp 222.476.500 | Rp 216.116.081 | 97,14 | Rp 6.360.419 |
| VIII | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Rp 8.455.000 | Rp 5.905.000 | 69,84 | Rp 2.550.000 |

| | | | | | |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| 1 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Rp 8.455.000 | Rp 5.905.000 | 69,84 | Rp 2.550.000 |
| | - Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Rp 8.455.000 | Rp 5.905.000 | 69,84 | Rp 2.550.000 |
| IX | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Rp 284.316.000 | Rp 266.356.848 | 93,68 | Rp 8.683.000 |
| 1 | Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil | Rp 284.316.000 | Rp 266.356.848 | 93,68 | Rp 8.683.000 |
| | - Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi (DAK NON FISIK) | Rp 284.316.000 | Rp 266.356.848 | 93,68 | Rp 17.959.152 |
| Jumlah | | Rp 8.218.431.407 | Rp 7.296.428.898 | 74,96 | Rp 793.909.119 |

2.1.6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-faktor Penyebab :

- a. Melakukan Review terhadap target kinerja dalam dokumen Renstra.
- b. Menyusun perencanaan kegiatan secara akurat dan mempedomani dokumen yang telah disusun.
- c. Untuk program dan kegiatan yang sifatnya urgen tetapi belum terakomodasi dalam dokumen renstra agar dibuatkan penjelasan dan dicantumkan kedalam dokumen Renstra pada saat dilakukan review.
- d. Menyusun Perencanaan dan penganggaran yang disesuaikan dengan tahapan target kinerja serta memperhatikan tingkat capaian yang telah dilaksanakan.
- e. Mempertimbangkan untuk direncanakan kembali pada dokumen Review Renstra periode selanjutnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka

| No | Indikator Kinerja | SPM/Standar Nasional | IKK | Perangkat Target Renstra Daerah | | | | Realisasi Capaian | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|---|----------------------|-------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | Tahun 2023 | Tahun 2025 | |
| 1 | 4 | | | | | | | | | | 8 |
| 1 | Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Kepada Semua Lapisan Masyarakat | 100% | 99,00 | 99,00 | 97,50 | 98,00 | 99,00 | 100,00 | 98,00 | 99,00 | |
| 2 | Persentase Peningkatan Investasi daerah | 100% | 35,00 | 35,00 | 9,25 | 9,50 | 9,75 | 35,00 | 9,50 | 9,75 | |
| 3 | Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah | BB | BB | BB (75,64) | BB (76,00) | A (80,00) | A (81,00) | BB (70,16) | A (80,00) | A (81,00) | |
| 4 | Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Kesekretariatan | BAIK | BAIK | SANGA T BAIK | SANGA T BAIK | SANGA T BAIK | SANGA T BAIK | SANGA T BAIK | SANGA T BAIK | SANGA T BAIK | |
| 5 | Persentase Koperasi Aktif | 100% | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 89,00 | 90,00 | 88,00 | 89,00 | 90,00 | |
| 6 | Persentase UMKM yang Naik Kelas | 100% | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | |

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam menentukan pola organisasinya, maka Pemerintah Daerah memerlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas dalam merumuskan, mendesain dan mengimplementasikan

visi dan misi pemerintah daerah kedalam pola organisasi pemerintah daerah, dengan organisasi pemerintah kabupaten merupakan wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dan sebagai proses interaksi antara pemerintah institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar-pilar pembangunan daerah.

- Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pelayanan perizinan belum optimal dikarenakan diterapkannya sistem aplikasi pelayanan perizinan online terbaru yaitu OSS-RBA dan Sicantik;
- b. Standar Operasional Procedure (SOP) yang sudah disusun menjadi tidak relevan lagi dengan diberlakukannya Online Single Submission (OSS) dan Sicantik;
- c. Sarana dan prasarana pelayanan utama yang ada sekarang belum memiliki standar pelayanan yang sudah ditetapkan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
- d. Data investasi daerah yang sudah disusun tidak valid dikarena pihak investor tidak memberikan data yang ada dengan sebenarnya;
- e. Sering Terlambatnya penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari perusahaan PMDN dan PMA yang sudah terdaftar yang memiliki kewajiban menyampaikan setiap 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan sekali;
- f. Data Koperasi yang tidak valid;
- g. Adanya penurunan koperasi aktif;

h. Data UMKM yang tidak valid.

- Dampak yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
 - a. Menyebabkan personal SDM aparatur pelayanan yang ada masih harus belajar lagi dan memahami sistem OSS dan Sicantik;
 - b. Sehingga menyebabkan pelaksanaan pelayanan perizinan menjadi lambat dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. Maka pelayanan yang dilakukan masih memakai sarana dan prasarana yang lama dan sesuai dengan model pelayanan modern sudah tidak standar lagi;
 - d. Data yang diperoleh dari perusahaan PMDN dan PMA sebagai sumber data yang diberikan tidak akurat sehingga hal ini akan mempengaruhi pelaporan penanaman modal;
 - e. Kurangnya pemahaman yang lebih dari investor-investor yang terdaftar guna memenuhi kewajibannya;
 - f. Tidak samanya data OPD dengan ODS (Original Data System) yang ada di Sistem Kementerian Koperasi dan UKM;
 - g. Pihak Koperasi tidak banyak yang melaporkan kemajuan koperasi dan kurangnya pembinaan karena tersebar di 8 (delapan) kecamatan dan lokasinya sangat berjauhan serta keterbatasan SDM;
 - h. Keterbatasan Personal SDM aparatur pengelola UMKM dalam melakukan monitoring lapangan terhadap UMKM yang telah terdaftar;
- Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Bangka kedepan mempunyai tantangan yang harus diantisipasi dan peluang yang harus dimanfaatkan. Adapun tantangan dan peluang adalah sebagai berikut :

• **Tantangan :**

- a. Kebijakan pusat yang selalu berubah dan memerlukan pengkajian dan implementasi kebijakan baru suatu daerah;
- b. Masih adanya investor yang belum sadar terkait kewajiban pelaporan penanaman modal yang diatur oleh perundang-undangan;
- c. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai ANJAB dan ABK pada DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka;
- d. Masih rendahnya kesadaran pada OPD teknis tentang kewenangan dan kewajiban yang dimiliki tentang perizinan dan penanaman modal sesuai urusan.

• **Peluang :**

- a. Tersedianya dasar hukum yang kuat dari Pemerintah Pusat yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan akses penanaman modal dan akses perijinan usaha yang ada di daerah dengan seluas-luasnya;
- b. Tersedianya jaringan infrastruktur daerah sehingga masih memungkinkan untuk lebih dikembangkan guna meningkatkan gairah usaha para investor di Kabupaten Bangka;
- c. Banyak lahan dan kawasan potensial yang belum dimanfaatkan masyarakat sebagai modal daerah untuk menarik minat investor yang ingin mengembangkan usahanya di Kabupaten Bangka;
- d. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat membuka peluang bagi DINPMP2KUKM untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perizinan dan pengenalan potensi investasi.

Adapun Isu-isu penting yang ada pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi SDM dan Standar Pelayanan;
- Melakukan updating dan verifikasi Data Peluang Investasi;
- Menyempurnakan dan memperbaiki SOP dan Standar Pelayanan yang masih belum sesuai dengan jumlah jenis pelayanan;
- Memberikan informasi pentingnya menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagai salah informasi perkembangan usaha dalam negeri dan asing;
- Menyediakan anggaran promosi yang memadai;
- Menyediakan sarana informasi investasi secara online;
- Mengoptimalkan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi yang berprestasi;
- Melakukan pendataan mengenai koperasi aktif;
- Optimalisasi Pembinaan, Pengembangan usaha dan fasilitasi permodalan bagi usaha mikro,kecil dan menengah serta pengawasan terhadap usaha kecil dan menengah;
- Penentuan komponen-komponen standar UMKM yang naik kelas;
- Mengoptimalkan mekanisme pengaduan dari masyarakat;
- Mengoptimalkan peningkatan kompetensi pelaksana SDM dengan melakukan pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal;
- Mengintegrasikan seluruh perangkat daerah teknis perizinan kepada Dinas Penanam Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Mewujudkan aplikasi perizinan yang terintegrasi dengan OPD Teknis;
- Mengoptimalkan manajemen penatalaksanaan, penataan sistem manajemen SDM dan penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja;
- Melengkapi SOP sebagai pelaksanaan kegiatan setiap bidang yang ada;
- Menyediakan Sarana dan Prasarana pendukung yang belum ada;
- Melakukan pemerataan kompetensi SDM Aparatur Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta PTSP.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Menyelaraskan usulan-usulan awal RKPD yang sudah diusulkan para Forum OPD dan menyempurnakannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 untuk Program dan Kegiatan yang diusulkan pada Tahun 2025 sebagaimana tabel T-C.31.

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
DINPMP2KUKM KABUPATEN BANGKA**

| NO KODE | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN |
|---------|---|--------|-------------------|----------------|---------------------|---|--------|-------------------|----------------|---------------------|---------|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP) | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 9.920.893.600,00 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 9.920.893.600,00 | |
| 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | 890.836.491,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | 890.836.491,00 | |
| 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | 93.940.000,00 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | 93.940.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------|---|-----------------------|----------------------|--|--------------------|---|-----------------------|----------------------|--|
| | | | Persentase Koperasi yang Aktif | 42,00% | | | | Persentase Koperasi yang Aktif | 42,00% | | |
| 2.17.03.201 | Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Kab. Bangka | Persentase Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi | 47,39% | 93.940.000,00 | Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Kab. Bangka | Persentase Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi | 42,00% | 93.940.000,00 | |
| <i>2.17.03.201.0004</i> | <i>Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota</i> | <i>Kab. Bangka</i> | <i>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i> | <i>100 Unit Usaha</i> | <i>39.140.000,00</i> | <i>Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota</i> | <i>Kab. Bangka</i> | <i>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i> | <i>100 Unit Usaha</i> | <i>39.140.000,00</i> | |
| <i>2.17.03.201.0003</i> | <i>Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</i> | <i>Kab. Bangka</i> | <i>Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</i> | <i>20 Unit Usaha</i> | <i>54.800.000,00</i> | <i>Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</i> | <i>Kab. Bangka</i> | <i>Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</i> | <i>20 Unit Usaha</i> | <i>54.800.000,00</i> | |
| 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | | 35.086.491,00 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | | 35.086.491,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-------------|--|---------------|----------------|---|-------------|--|---------------|----------------|--|
| | | | Persentase Koperasi Sehat | 42,00% | | | | Persentase Koperasi Sehat | 42,00% | | |
| 2.17.04.201 | Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bangka | Persentase Koperasi KSP/USP yang dilakukan penilaian terhadap kesehatan Koperasi | 87,50% | 35.086.491,00 | Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bangka | Persentase Koperasi KSP/USP yang dilakukan penilaian terhadap kesehatan Koperasi | 42,00% | 35.086.491,00 | |
| 2.17.04.201.0001 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Bangka | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | 20 Unit Usaha | 35.086.491,00 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Bangka | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | 20 Unit Usaha | 35.086.491,00 | |
| 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | 235.700.000,00 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | 235.700.000,00 | |
| | | | Persentase SDM Koperasi yang mempunyai Kompetensi | 1,38% | | | | Persentase SDM Koperasi yang mempunyai Kompetensi | 1,38% | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------|--|-----------------|-----------------------|---|--------------------|--|-----------------|-----------------------|--|
| 2.17.05.201 | Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bangka | Persentase SDM Koperasi memiliki pemahaman dan pengetahuan dalam pengelolaan koperasi | 100,00% | 235.700.000,00 | Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bangka | Persentase SDM Koperasi memiliki pemahaman dan pengetahuan dalam pengelolaan koperasi | 100,00% | 235.700.000,00 | |
| <i>2.17.05.201.0001</i> | <i>Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</i> | <i>Kab. Bangka</i> | <i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i> | <i>70 orang</i> | <i>235.700.000,00</i> | <i>Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</i> | <i>Kab. Bangka</i> | <i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i> | <i>70 orang</i> | <i>235.700.000,00</i> | |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | 131.110.000,00 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | 131.110.000,00 | |
| | | | Persentase UMKM yang mendapatkan kemudahan berusaha | 3,04% | | | | Persentase UMKM yang mendapatkan kemudahan berusaha | 3,04% | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------|--|---------------------|-----------------------|--|--------------------|--|---------------------|-----------------------|--|
| 2.17.07.201 | Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Kab. Bangka | Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 3,04% | 131.110.000,00 | Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Kab. Bangka | Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 3,04% | 131.110.000,00 | |
| <i>2.17.07.201.0008</i> | <i>Pemulihan Usaha Mikro</i> | <i>Kab. Bangka</i> | <i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i> | <i>1 Unit Usaha</i> | <i>18.780.000,00</i> | <i>Pemulihan Usaha Mikro</i> | <i>Kab. Bangka</i> | <i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i> | <i>1 Unit Usaha</i> | <i>18.780.000,00</i> | |
| <i>2.17.07.201.0002</i> | <i>Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro</i> | <i>Kab. Bangka</i> | <i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro</i> | <i>5 unit usaha</i> | <i>15.750.000,00</i> | <i>Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro</i> | <i>Kab. Bangka</i> | <i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro</i> | <i>5 unit usaha</i> | <i>15.750.000,00</i> | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------|--|---------------|-------------------------|---|--------------------|--|---------------|-------------------------|--|
| 2.17.07.20 1.0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | Kab. Bangka | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | 60 Orang | 96.580.000,00 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | Kab. Bangka | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | 60 Orang | 96.580.000,00 | |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | 395.000.000,00 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | 395.000.000,00 | |
| | | | Persentase Usaha Mikro yang naik kelas | 15,19% | | | | Persentase Usaha Mikro yang naik kelas | 15,19% | | |
| 2.17.08.2 01 | Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Kab. Bangka | Persentase Modal Usaha dan Omset UMKM yang meningkat | 67% | 395.000.000,00 | Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Kab. Bangka | Persentase Modal Usaha dan Omset UMKM yang meningkat | 67% | 395.000.000,00 | |
| 2.17.08.20 1.0002 | Pengembangan Usaha Mikro | Kab. Bangka | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | 84 Unit Usaha | 395.000.000,00 | Pengembangan Usaha Mikro | Kab. Bangka | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | 84 Unit Usaha | 395.000.000,00 | |
| 2.18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | 9.030.057.109,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | 9.030.057.109,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|--|-------|-------------------------|--|--------------------|--|-------|-------------------------|--|
| 2.18.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 7.853.997.109,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 7.853.997.109,00 | |
| | | | Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah | 26,12 | | | | Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah | 26,12 | | |
| | | | Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah | 10,25 | | | | Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah | 10,25 | | |
| 2.18.01.201 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bangka | Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar | 100% | 36.450.000,00 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bangka | Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar | 100% | 36.450.000,00 | |
| | | | Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar | 100% | | | | Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar | 100% | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|--|------------|---------------|---|--------------------------|--|------------|---------------|--|
| 2.18.01.20 1.0001 | Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Kab. Bangka, Sungailiat, | Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun | 8 dokumen | 15.850.000,00 | Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Kab. Bangka, Sungailiat, | Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun | 8 dokumen | 15.850.000,00 | |
| 2.18.01.20 1.0006 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Kab. Bangka, Sungailiat, | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Dokumen | 20.600.000,00 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Kab. Bangka, Sungailiat, | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Dokumen | 20.600.000,00 | |
| | | | Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI | 0% | | | | Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI | 0% | | |

| 2.18.01.202 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bangka | Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun Sesuai Standar | 100% | 6.012.020.000,00 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bangka | Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun Sesuai Standar | 100% | 6.012.020.000,00 | |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|---|-------------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|--|
| <i>2.18.01.202.0001</i> | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i> | <i>Kab. Bangka, Sungailiat</i> | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> | <i>38 Orang/bulan</i> | <i>5.981.180.000,00</i> | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i> | <i>Kab. Bangka, Sungailiat</i> | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> | <i>38 Orang/bulan</i> | <i>5.981.180.000,00</i> | |
| <i>2.18.01.202.0003</i> | <i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i> | <i>Kab. Bangka, Sungailiat</i> | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i> | <i>410 Dokumen (205 SPP dan 205 SPM)</i> | <i>18.950.000,00</i> | <i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i> | <i>Kab. Bangka, Sungailiat</i> | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i> | <i>12 Dokumen</i> | <i>18.950.000,00</i> | |
| <i>2.18.01.202.0007</i> | <i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i> | <i>Kab. Bangka, Sungailiat</i> | <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan</i> | <i>14 Laporan (12 Laporan Bulanan dan 2 Laporan Semesteran)</i> | <i>11.890.000,00</i> | <i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i> | <i>Kab. Bangka, Sungailiat</i> | <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan</i> | <i>2 Laporan</i> | <i>11.890.000,00</i> | |

| | | | <i>Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD</i> | | | | <i>Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD</i> | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|----------------|----------------------|--|---|---|----------------|----------------------|
| | | | Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah | 64,12 | | | Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah | 64,12 | | |
| 2.18.01.205 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bangka | Persentase Pegawai yang mengenakan Atribut Lengkap | 100,00% | 82.320.000,00 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bangka | Persentase Pegawai yang mengenakan Atribut Lengkap | 100,00% | 82.320.000,00 |
| | | | Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 27,78% | | | | Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 27,78% | |
| <i>2.18.01.205.0002</i> | <i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i> | <i>Kab. Bangka, Sungailiat</i> | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta</i> | <i>1 Paket</i> | <i>16.500.000,00</i> | <i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i> | <i>Kab. Bangka, Sungailiat</i> | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i> | <i>1 Paket</i> | <i>16.500.000,00</i> |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|---|--------------|-----------------------|--|-------------------------|---|--------------|-----------------------|--|
| | | | <i>Atribut Kelengkapan</i> | | | | | | | | |
| 2.18.01.20 5.0003 | Sub Kegiatan Pengadaan dan Pengolahan Admnistrasi Kepegawaian | Kab. Bangka, Sungailiat | jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | 11 dokumen | 38.320.000,00 | Sub Kegiatan Pengadaan dan Pengolahan Admnistrasi Kepegawaian | Kab. Bangka, Sungailiat | jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | 11 dokumen | 38.320.000,00 | |
| 2.18.01.20 5.0009 | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab. Bangka, Sungailiat | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | 27.500.000,00 | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab. Bangka, Sungailiat | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | 27.500.000,00 | |
| | | | Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah | 3,50% | | | | Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah | 3,50% | | |
| 2.18.01.206 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bangka | Persentase Layanan Administrasi Umum di Perangkat | 100% | 352.632.109,00 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bangka | Persentase Layanan Administrasi Umum di Perangkat | 100% | 352.632.109,00 | |

| | | | Daerah | | | | | Daerah | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|-------------|-------------------------|---|--------------------------|---|-------------|-------------------------|--|
| 2.18.01.20 6.0009 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bangka, Sungailiat, | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 281.422.109,00 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bangka, Sungailiat, | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 281.422.109,00 | |
| 2.18.01.20 6.0010 | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Bangka, Sungailiat, | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen | 32.560.000,00 | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Bangka, Sungailiat, | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen | 32.560.000,00 | |
| 2.18.01.20 6.0011 | Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD | Kab. Bangka, Sungailiat, | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | 12 Dokumen | 38.650.000 | Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD | Kab. Bangka, Sungailiat, | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | 12 Dokumen | 38.650.000 | |
| 2.18.01.2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bangka | Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di | 100% | 1.004.375.000,00 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bangka | Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah | 100% | 1.004.375.000,00 | |

| | | | Perangkat Daerah | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|--|---------------|----------------|--|--------------------------|--|---------------|----------------|--|
| 2.18.01.2.0 8.0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bangka, Sungailiat, | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 802.950.000,00 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bangka, Sungailiat, | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 802.950.000,00 | |
| 2.18.01.2.0 8.0002 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bangka, Sungailiat, | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 126.625.000,00 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bangka, Sungailiat, | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 126.625.000,00 | |
| 2.18.01.2.0 8.0004 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bangka, Sungailiat, | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 74.800.000,00 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bangka, Sungailiat, | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 74.800.000,00 | |
| | | | Persentase BMD Perangkat Daerah dalam kondisi | 75,00% | | | | Persentase BMD Perangkat Daerah dalam kondisi baik | 75,00% | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------------|--|----------------|-----------------------|--|---------------------------------|--|----------------|-----------------------|--|
| | | | <i>baik</i> | | | | | | | | |
| 2.18.01.207 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bangka | Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 112.470.000,00 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bangka | Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 112.470.000,00 | |
| <i>2.18.01.207.0002</i> | <i>Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i> | <i>Kab. Bangka, Sungailiat,</i> | <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i> | <i>1 Unit</i> | <i>-</i> | <i>Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i> | <i>Kab. Bangka, Sungailiat,</i> | <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i> | <i>1 Unit</i> | <i>-</i> | |
| <i>2.18.01.207.0005</i> | <i>Sub Kegiatan Pengadaan Mebel</i> | <i>Kab. Bangka, Sungailiat,</i> | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i> | <i>5 unit</i> | <i>39.890.000,00</i> | <i>Sub Kegiatan Pengadaan Mebel</i> | <i>Kab. Bangka, Sungailiat,</i> | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i> | <i>5 unit</i> | <i>39.890.000,00</i> | |
| <i>2.18.01.207.0006</i> | <i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i> | <i>Kab. Bangka, Sungailiat,</i> | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> | <i>12 unit</i> | <i>72.580.000,00</i> | <i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i> | <i>Kab. Bangka, Sungailiat,</i> | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> | <i>12 unit</i> | <i>72.580.000,00</i> | |

| 2.18.01.2.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bangka | Persentase Barang Milik Daerah Yang Di Pelihara | 100% | 253.730.000,00 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bangka | Persentase Barang Milik Daerah Yang Di Pelihara | 100% | 253.730.000,00 | |
|--------------------------|--|---------------------------------|---|---|-----------------------|--|---------------------------------|---|---|-----------------------|--|
| <i>2.18.01.2.09.0002</i> | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i> | <i>Kab. Bangka, Sungailiat,</i> | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | <i>18 unit (14 uni kendaraan roda 2, 4 unit kendaraan roda 4)</i> | <i>156.550.000,00</i> | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i> | <i>Kab. Bangka, Sungailiat,</i> | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | <i>18 unit (14 uni kendaraan roda 2, 4 unit kendaraan roda 4)</i> | <i>156.550.000,00</i> | |
| <i>2.17.01.2.09.0006</i> | <i>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i> | <i>Kab. Bangka, Sungailiat,</i> | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | <i>20 Unit</i> | <i>58.640.000,00</i> | <i>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i> | <i>Kab. Bangka, Sungailiat,</i> | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | <i>20 Unit</i> | <i>58.640.000,00</i> | |
| <i>2.17.01.2.09.0009</i> | <i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i> | <i>Kab. Bangka, Sungailiat,</i> | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i> | <i>1 Unit</i> | <i>38.540.000,00</i> | <i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i> | <i>Kab. Bangka, Sungailiat,</i> | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang</i> | <i>1 Unit</i> | <i>38.540.000,00</i> | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------|--|------------------|----------------------|--|--------------------|---|------------------|----------------------|--|
| | | | <i>yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i> | | | | | <i>Dipelihara/Di rehabilitasi</i> | | | |
| 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | 38.520.000,00 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | 38.520.000,00 | |
| | | | Persentase Potensi Peluang Investasi | 45,00% | | | | Persentase Potensi Peluang Investasi | 45,00% | | |
| 2.18.02.2.02 | Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota | Kab. Bangka | Jumlah Sektor Investasi Daerah | 1 Dokumen | 38.520.000,00 | Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota | Kab. Bangka | Jumlah Sektor Investasi Daerah | 1 Dokumen | 38.520.000,00 | |
| <i>2.18.02.2.02.0004</i> | <i>Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i> | <i>Kab. Bangka</i> | <i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</i> | <i>1 Dokumen</i> | <i>38.520.000,00</i> | <i>Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i> | <i>Kab. Bangka</i> | <i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i> | <i>1 Dokumen</i> | <i>38.520.000,00</i> | |
| 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | 89.180.000,00 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | 89.180.000,00 | |
| | | | Persentase Promosi Investasi | 100,00% | | | | Persentase Promosi Investasi | 100,00% | | |
| 2.18.03.2.01 | Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah | Kab. Bangka | Jumlah Promosi Investasi Daerah | 1 Kali | 89.180.000,00 | Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah | Kab. Bangka | Jumlah Promosi Investasi Daerah | 1 Kali | 89.180.000,00 | |

| | Kabupaten/Kota | | | | | Kabupaten/Kota | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------|--|-------------|-----------------------|---|--------------------|--|-------------|-----------------------|--|
| 2.18.03.2.0 1.000002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bangka | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota | 1 Dokumen | 89.180.000,00 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bangka | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 89.180.000,00 | |
| 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | 557.730.000,00 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | 557.730.000,00 | |
| | | | IKM Bidang Pelayanan Perizinan | 89% | | | | IKM Bidang Pelayanan Perizinan | 89% | | |
| 2.18.04.2.01 | Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Kab. Bangka | Persentase Pelayanan Perizinan Yang diselesaikan sesuai standar waktu | 100% | 557.730.000,00 | Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Kab. Bangka | Persentase Pelayanan Perizinan Yang diselesaikan sesuai standar waktu | 100% | 557.730.000,00 | |
| | | | Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan | 100% | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan | 100% | | |

| | | | Sesuai Standar Pelayanan Publik | | | | | Sesuai Standar Pelayanan Publik | | | |
|-----------------------|--|-------------|--|-------------------|----------------|--|-------------|--|-------------------|----------------|--|
| | | | Persentase Kompetensi Sumber Daya Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan | 100% | | | | Persentase Kompetensi Sumber Daya Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan | 100% | | |
| 2.18.04.2.0 1.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Kab. Bangka | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 1000 Pelaku Usaha | 544.890.000,00 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Kab. Bangka | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 1000 Pelaku Usaha | 544.890.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------------|--|----------------|---|-----------------|-----------------------|--|
| 2.18.04.2.0 1.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | Kab. Bangka | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 48 orang | 12.840.000,00 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | Kab. Bangka | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 48 Pelaku Usaha | 12.840.000,00 | |
| 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | 474.040.000,00 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | 474.040.000,00 | |
| | | | Persentase pengendalian investor yang melakukan penanaman modal | 100,00% | | | | Persentase pengendalian investor yang melakukan penanaman modal | 100,00% | | |

| 2.18.05.2.01 | Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bangka | Persentase LKPM yang diselesaikan | 80% | 474.040.000,00 | Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bangka | Persentase LKPM yang diselesaikan | 80% | 474.040.000,00 | |
|-------------------------|--|--------------------|---|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|---|--------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | <i>Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya</i> | <i>Kab. Bangka</i> | <i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya</i> | <i>10 Kegiatan Usaha</i> | <i>112.321.000,00</i> | |
| <i>2.18.05.201.0005</i> | <i>Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha</i> | <i>Kab. Bangka</i> | <i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha</i> | <i>200 pelaku usaha</i> | <i>350.900.000,00</i> | <i>Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha</i> | <i>Kab. Bangka</i> | <i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha</i> | <i>200 pelaku usaha</i> | <i>238.579.000,00</i> | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|--|--------------------------|-----------------------|--|
| | | | <i>Berbasis Risiko</i> | | | | | <i>Risiko</i> | | | |
| 2.18.05.20 1.0006 | <i>Pengawasan Penanaman Modal</i> | <i>Kab. Bangka</i> | <i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan</i> | <i>50 kegiatan usaha</i> | <i>123.140.000,00</i> | <i>Pengawasan Penanaman Modal</i> | <i>Kab. Bangka</i> | <i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i> | <i>50 kegiatan usaha</i> | <i>123.140.000,00</i> | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------------|--|-------------|----------------------|---|--------------------|--|-------------|----------------------|--|
| | | | <i>Berusaha</i> | | | | | | | | |
| 2.18.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | 16.590.000,00 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | 16.590.000,00 | |
| | | | Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola | 100% | | | | Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola | 100% | | |
| 2.18.06.2 01 | Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada | Kab. Bangka | Persentase Ketersediaan Informasi Online | 100% | 16.590.000,00 | Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada | Kab. Bangka | Persentase Ketersediaan Informasi Online | 100% | 16.590.000,00 | |

| | Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Persentase Ketersediaan Standar Pelayanan | 100% | | Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Persentase Ketersediaan Standar Pelayanan | 100% | | |
|----------------------|---|--------------------|---|------------------|-------------------------|---|--------------------|---|------------------|-------------------------|--|
| 2.18.06.20 1.0002 | <i>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i> | <i>Kab. Bangka</i> | <i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i> | <i>6 Dokumen</i> | <i>16.590.000,00</i> | <i>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i> | <i>Kab. Bangka</i> | <i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i> | <i>6 Dokumen</i> | <i>16.590.000,00</i> | |
| | | | | | 9.920.893.600,00 | | | | | 9.920.893.600,00 | |

2.5 Penelaahan Usulan dan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan, membina, mengoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2024 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat

karena hanya menjalankan kegiatan bersifat rutinitas sebagai unsur penunjang.

Pada Musrenbang Tahun 2025 terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan dalam menjalankan kegiatan bersifat rutinitas sebagai unsur penunjang.

TABEL T-C 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Bangka

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|-----------|---|---------------|---|-----------------------|--|
| 1 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Kab. Bangka | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | - | Penyelenggaraan Bazaar dan pameran produk UMKM |
| 2 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Kab. Bangka | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | - | Pelatihan olahan hasil peternakan |
| 3 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Kab. Bangka | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | - | Penyelenggaraan Bazaar dan pameran produk UMKM |
| 4 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Kab. Bangka | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | - | Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah |

| | | | | | |
|---|---|-------------|---|---|--|
| 5 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Kab. Bangka | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | - | Penyelenggaraan Bazaar dan pameran produk UMKM |
| 6 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Kab. Bangka | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | - | Pelatihan pengurus Koperasi |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Terdapat 8 kelompok yang menjadi Prioritas Pembangunan nasional, yaitu :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Baru
3. Melanjutkan Perkembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Mengembangkan Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4. Mengembangkan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
8. Memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan

toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Terkait dengan ke-8 Prioritas Rencana Pembangunan Nasional dimaksud, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2025 membantu Bupati melaksanakan, membina, mengkoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal. Dan untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka mempunyai fungsi, yang terdiri dari :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, investasi, promosi, pelayanan perizinan dan non perizinan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal, investasi, promosi, pelayanan perizinan dan non perizinan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal, investasi, promosi, pelayanan perizinan dan non perizinan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dari ke-8 Prioritas Rencana Pembangunan Nasional tersebut yang mendukung dan selaras dengan Rencana Prioritas Nasional dan Daerah adalah *Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.*

Terdapat lima arah kebijakan yang difokuskan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional 3 yang tertuang dalam sasaran dan indikator pada tabel di atas, antara lain (1) melanjutkan pembangunan infrastruktur, (2) mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-

luasnya, (3) penguatan koperasi, (4) mengembangkan industri kreatif, serta (5) pendalaman sektor keuangan.

Arah kebijakan penguatan koperasi dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat kelembagaan dan tata kelola koperasi agar sesuai dengan tantangan ekonomi saat ini, termasuk melalui undang-undang perkoperasian serta aturan turunan yang mengatur koperasi multipihak; (2) memperkuat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi untuk menjadikan koperasi yang unbankable menjadi koperasi bankable; (3) menyosialisasikan bentuk hukum koperasi agar dapat dijadikan alternatif utama bagi milenial dan Gen Z yang ingin mendirikan usaha berbadan hukum serta memperkuat kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata, dan ekonomi kreatif; (4) memberikan bantuan peningkatan kemampuan manajemen koperasi untuk bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan keuntungan anggota; (5) mengembangkan koperasi sektor produksi, termasuk melalui perkuatan dan revitalisasi Koperasi Unit Desa; (6) mengembangkan sistem pengawasan koperasi simpan pinjam; serta (7) memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara sebagai alat negara untuk benteng pertahanan ekonomi nasional, penyediaan layanan dasar dan strategis, meningkatkan daya saing nasional, sekaligus sebagai salah satu motor pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini penting agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan lebih terarah sesuai dengan potensi, hambatan dan kendala yang ada. Karenanya diperlukan analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal guna menentukan faktor-faktor keberhasilannya. Rencana kerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada

tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan. Hal ini merupakan perbandingan organisasi yang dilakukan pada akhir tahun pelaksanaan.

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dan keterkaitannya dengan RPD Kabupaten 2024-2026 adalah :

- A. Tujuan yang akan dicapai yaitu : *Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan kepada Semua Lapisan Masyarakat. Dengan indikator tujuan adalah : Akuntabilitas Pelayanan Perizinan Bernilai Baik. (CASCADING)*

Sehingga Sasaran adalah :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan;

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD dapat dilihat pada tabel 3.2.1. berikut ini :

Tabel 3.2.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kinerja Pada Tahun Ke-n | |
|----|--|---|--|--------------------------------|--------------------|
| | | | | 2025 | Tahun Akhir (2024) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 |
| 1. | Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat | Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada semua lapisan masyarakat | Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP | 100,00 | 100,00 |
| | | | Indek Kepuasan Masyarakat | 90,00 | 89,00 |
| | | Meningkatnya Jumlah Investor Yang Menanam | Persentase Peningkatan Investasi Daerah | 55,00 | 50,00 |

| | | | | | |
|----|---|---|---|-------------|-------------|
| | | kan Modal | | | |
| 2. | Meningkatkan Akuntabilitas DINPMP2KU KM | Meningkatnya Akuntabilitas DINPMP2 KUKM | Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah | AA (81,00) | BB (78,00) |
| | | Meningkatnya Kualitas Layanan DINPMP2 KUKM | Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan | SANGAT BAIK | SANGAT BAIK |
| 3. | Meningkatkan Pertumbuhan Kewirausahaan Koperasi dan UMKM. | Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah | Persentase Koperasi Aktif | 45,00 | 42,00 |
| | | | Persentase Usaha Mikro naik Kelas | 15,20 | 15,19 |

Adapun rumusan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat.

| Sasaran | Indikator |
|---|--|
| 1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Kepada Semua Lapisan Masyarakat | 1.Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP |

| Sasaran | Indikator |
|--|---|
| 2.Meningkatnya Jumlah Investor Yang Menanamankan Modal | 1.Persentase Peningkatan Investasi Daerah |

| Sasaran | Indikator |
|--|--|
| 3.Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM) | 1. Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah |

| Sasaran | Indikator |
|---|--|
| Meningkatnya Kualitas Layanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM) | 1. Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan |

**Tujuan 2 : Peningkatan Pertumbuhan Kewirausahaan
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah**

| Sasaran | Indikator |
|--|---|
| 5. Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah | 1. Persentase Koperasi Aktif 2. Persentase Usaha Mikro Yang Naik Kelas |

Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka melakukan Kontrak Kinerja dengan Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Bupati Bangka. Kontrak kinerja ini merupakan sasaran strategis yang akan dicapai sebagai acuan arah kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diperlukan adanya strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka serta keterkaitannya dengan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 adalah :

a. Strategi

Adapun Strategi yang digunakan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Sistem Informasi dalam mendukung Pelayanan Publik yang lebih baik;
2. Memberikan Akses dan Kemudahan Investasi Daerah;
3. Penguatan Lembaga Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil Menengah Serta Penyediaan Fasilitas Pengembangan Kemampuan Usaha Kreatif Masyarakat.

b. Kebijakan

Adapun Kebijakan yang digunakan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Sistem Informasi Perizinan Investasi Secara Online dan menyederhanakan Jalur Birokrasi Perizinan dengan Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
2. Memberikan Informasi dan Prospek Potensi Investasi Daerah;
3. Mendorong dan Menjalin Kemitraan Usaha Mikro Kecil Menengah serta penguatan Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi.

3.3. Program dan Kegiatan.

Penetapan Program dan Kegiatan organisasi pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah program dan kegiatan yang menjadi acuan pada kebijakan umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Penanaman Modal Daerah dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kebijakan Umum adalah Membangun jaringan komunikasi perizinan investasi secara online dan melakukan pembinaan perkoperasian dan usaha kecil menengah. Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka terdapat 11 Program, 16 Kegiatan serta 39 Sub Kegiatan dengan total anggaran Rp. 9.920.893.600, adapun program-program acuan tersebut adalah :

1. 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
 - KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan
2. 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
 - KEGIATAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 3. 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
 - KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
 4. 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA
 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
 - Sub Kegiatan Pemulihan Usaha Mikro
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro
 - Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan UMKM Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM UMKM Dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan Dan Pelatihan
 5. 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
 - KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL
 - Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro

6. 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
- KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
- KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
- KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

7. 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

- KEGIATAN PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA
 - Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/kota
8. 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
- KEGIATAN PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
9. 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
- KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik
 - Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
10. 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
- KEGIATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha
 - Sub Kegiatan Pengawasann Penanaman Modal
11. 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
- KEGIATAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG TERINTEGRASI
 - Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Untuk melaksanakan program-program tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan OPD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan mengedepan hal-hal sebagai berikut :

- b. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap program dan kegiatan Tahun 2023 adalah:
 1. Pencapaian SDGs;
 2. Pengentasan Kemiskinan;
 3. Pencapaian NSPK dan SPM;
 4. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah;
 5. Pengembangan Daerah Terisolir;
 6. Pelaksanaan sesuai Standar Operasional Procedure (SOP) yang telah ditetapkan;
 7. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan urusan wajib yaitu di bidang Penanaman Modal dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

- c. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Tahun 2025 antara lain meliputi :
 1. Jumlah program dan kegiatan yang direncanakan di Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2025 berjumlah 11 (sebelas) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan pada Prioritas I yang merupakan target utama dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setelah disetujui dalam proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang);
 2. Lokasi kegiatan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Sungailiat, Dalam Kabupaten Bangka dan Luar Kabupaten Bangka;
 3. Total dana/pagu indikatif sesuai rancangan rencana program dan kegiatan tahun 2025 yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 10.069.765.960,00;

- d. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya

Hal tersebut terjadi karena adanya Forum OPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|--|--|---|--|----------------|--|------------------|------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|----------------|------------------|---|------------------|--|
| | | | | | | | | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | 21 Unit Usaha | | | 7 Unit Usaha | 15.750.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 9 Unit Usaha | 16.222.500,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0008 | 2 | | | Pemulihan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | 3 Unit Usaha | | 1 Unit Usaha | 18.780.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1 Unit Usaha | 19.343.400,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0015 | 2 | | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | 276 Orang | | 62 Orang | 95.580.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 64 Orang | 98.447.400,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | |
| 5 | 2 | 17 | 08 | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase Usaha Mikro Naik Kelas | 15,27% | | 15,20 % | 395.000.000,00 | | | | | | | 15,20 % | 406.850.000,00 | | |
| 2 | 17 | 08 | 2.01 | | | | | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Persentase usaha mikro yang naik kelas | 15,27% | | 15,20 % | 395.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 15,27% | 406.850.000,00 | | | |
| 2 | 17 | 08 | 2.01 | 0002 | 2 | | | Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | 84 Unit Usaha | | 84 Unit Usaha | 395.000.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 84 Unit Usaha | 406.850.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | |
| 2 | 18 | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | 9.031.057.109,00 | | | | | | | | | 9.399.270.114,00 | | |
| 6 | 2 | 18 | 01 | | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik | 78,00% | | 76,50 % | 7.854.997.109,00 | | | | | | | 78,00 % | 3,70% | 8.187.928.314,00 | |
| | | | | | | | | | Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah | 3,70% | | 26,35 % | | | | | | | | 26,47% | | | |
| | | | | | | | | | Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah | 65,15% | | 64,56 % | | | | | | | | 65,15% | | | |
| | | | | | | | | | Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah | 0% | | 0 % | | | | | | | | 0% | | | |
| | | | | | | | | | Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah | 26,47% | | 26,35% | 36.450.000,00 | | | | Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi | Aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 26,47% | 37.543.500,00 | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 0001 | 2 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 24 Dokumen | | 8 Dokumen | 15.850.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi | Aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 8 Dokumen | 16.325.500,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 0006 | 2 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan | | 4 Laporan | 20.600.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi | Aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 4 Laporan | 21.218.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai standar | 100% | | 100 % | 6.012.020.000,00 | | | | Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan | - | 100% | 6.286.581.892,00 | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 0001 | 2 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 38 Orang/bulan | | 38 Orang/bulan | 5.981.180.000,00 | Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan | - | 38 Orang/bulan | 6.253.984.392,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|--|--|--------------------|--|--|---------------------|------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|---------------------|------------------|---|
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 6 Unit | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi | Aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 2 Unit | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 Unit | | | 5 Unit | 39.890.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi | Aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 5 Unit | 41.086.700,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit-Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 42 Unit | | | 14 Unit | 72.580.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi | Aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 16 Unit | 74.757.400,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah | 100% | | | 100 % | 1.004.375.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi | Aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 100% | 1.034.506.250,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 36 Laporan | | | 12 Laporan | 802.950.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi | Aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 12 Laporan | 827.038.500,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | | | 12 Laporan | 126.625.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi | Aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 12 Laporan | 130.423.750,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 36 Laporan | | | 12 Laporan | 74.800.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi | Aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 12 Laporan | 77.044.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase barang milik daerah yang dipelihara | 100% | | | 100 % | 254.730.000,00 | | | - | Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi | Aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 100% | 262.371.900,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 18 (14R2/4R4) Unit | | | 18 (14 R2/4R4) Unit | 156.550.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi | Aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 18 (14 R2/4R4) Unit | 161.246.500,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | | | 20 Unit | 58.640.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi | Aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 20 Unit | 60.399.200,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | 1 Unit | 39.540.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi | Aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1 Unit | 40.726.200,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 7 | 2 | 18 | 02 | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | Persentase Potensi Peluang Investasi | 55% | | | 50 % | 38.520.000,00 | | | - | | | 50 % | 39.675.600,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----|----|------|------|--|---|--|-------|--|-------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|-------------------|---------------|---|--|--|--------------------------|
| | | | | | | | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 150 Kegiatan Usaha | | | 50 Kegiatan Usaha | 80.340.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 50 Kegiatan Usaha | 82.750.200,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | |
| 11 | 2 | 18 | 06 | | | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang dikelola | 100 % | | 100 % | 16.590.000,00 | | | | | | 100 % | 17.087.700,00 | | | | |
| | 2 | 18 | 06 | 2.01 | | | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan informasi online | 100% | | 100 % | 16.590.000,00 | | | - | Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 100% | 17.087.700,00 | | | | |
| | 2 | 18 | 06 | 2.01 | 0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 18 Dokumen | | | 6 Dokumen | 16.590.000,00 | Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 6 Dokumen | 17.087.700,00 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | |
| J U M L A H | | | | | | | | | | | | 9.920.893.600,00 | | | | | | | | | | | 10.315.801.699,00 |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk Periode Tahun 2025 dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan OPD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dalam melaksanakan fungsi penunjang kegiatan yang disusun sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 yang menjadi dasar evaluasi hasil rencana Pembangunan Daerah untuk Periode Tahun 2025.

Dengan disusunnya laporan ini dapat menjadi pedoman daerah pegangan masing-masing OPD dalam membuat kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih fleksibel dan akuntabel pada periode setiap tahunnya.

Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra tahun 2024-2026, yang didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renja DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber di APBD, DAK Maupun APBN.
2. Renja DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka didalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan.
3. Renja akan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Tahun 2025 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Seluruh Aparatur DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka perlu meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien;

2. Dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka.

Sungailiat, 30 Juli 2024

**Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten
Bangka**



**DIAN FIRNANDY, SE
NIP. 197912182008041001**

LAMPIRAN



BUPATI BANGKA

**KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 100.3.3.2/ 1376 /BAPPEDA/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan Keputusan Bupati Bangka;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22 Seri D);
24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :
 - a. mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - b. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
 - c. menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, mulai dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir sampai pada Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
 - a. penanggung Jawab bertugas memastikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka tepat waktu dan sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka; dan
 - c. sekretaris bertugas melakukan pemeriksaan dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka; dan

d. anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bangka.

KEEMPAT : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Penanggung Jawab Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota tim.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Desember 2023

Pj. BUPATI BANGKA,



M. HARIS AR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
 NOMOR : 100.3.3.2/1376/BAPPEDA/2023
 TANGGAL : 8 DESEMBER 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

I. SEKRETARIAT DAERAH

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka | Penanggung Jawab |
| 2. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka | Ketua |
| 3. | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka | Sekretaris |
| 4. | Pranata Komputer Terampil pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka/Dwi Afriyanti, A.Md | Anggota |
| 5. | Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan /Sugianto, SE | Anggota |
| 6. | Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Adm.Perekonomian/ Nurleily, S.A.P. | Anggota |
| 7. | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/Adi Warman, SE. | Anggota |
| 8. | Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Adm.Kesra dan Kemasyarakatan/ Marisa, S.I.P. | Anggota |
| 9. | Analisis SDMA pada Bagian Umum dan Rumah Tangga/ Syaipudin, S.I.P. | Anggota |
| 10. | Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Keprotokolan/ Elisnawati, S.AP | Anggota |
| 11. | Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Ahmad Syahrudin, S.I.P. | Anggota |
| 12. | Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum dan HAM/ Hivia Sari Dewi, S.H. | Anggota |
| 13. | Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi/Fadya Nafaila, SH | Anggota |

II. SEKRETARIAT DPRD

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Sekretaris DPRD | Penanggung Jawab |
| 2. | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | Ketua |
| 3. | Perencana Ahli Muda pada Sekretariat DPRD | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan | Anggota |
| 5. | Kepala Bagian Umum | Anggota |
| 6. | Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan | Anggota |

III. INSPEKTORAT

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Inspektur | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Insepktorat | Ketua |
| 3. | Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Bangka | Sekretaris |
| 4. | Irban Bidang Pemerintahan | Anggota |
| 5. | Irban Bidang Investigasi | Anggota |
| 6. | Irban Bidang Ekonomi dan Keuangan | Anggota |
| 7. | Irban Bidang Pembangunan | Anggota |
| 8. | Irban Bidang Aparatur dan Kesra | Anggota |
| 9. | Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat | Anggota |

IV. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Ketua |
| 3. | Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Sarana dan Prasarana | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Sosial dan Ekonomi | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan | Anggota |
| 8. | Perencana pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi | Anggota |
| 9. | Perencana pada Bidang Sarana dan Prasarana | Anggota |
| 10. | Perencana pada Bidang Sosial dan Ekonomi | Anggota |
| 11. | Perencana pada Bidang Penelitian dan Pengembangan | Anggota |
| 12. | Statistisi pada Bidang Penelitian dan Pengembangan | Anggota |
| 13. | Analisis Kebijakan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi | Anggota |
| 14. | Perencana Ahli Pertama pada Bidang Sekretariat | Anggota |

V. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Ketua |
| 3. | Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Anggaran Daerah | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah | Anggota |
| 8. | Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Anggota |
| 9. | Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah | Anggota |
| 10. | Pelaksana pada Sekeratiat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Anggota |

VI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Sistem Informasi Kepegawaian | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM | Anggota |
| 7. | Analisis Perencanaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Anggota |
| 8. | Pengadministrasi Surat Menyurat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Anggota |

VII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Ketua |
| 3. | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan | Anggota |

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 6. | Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik | Anggota |
| 7. | Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan | Anggota |

VIII. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekeratris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | Ketua |
| 3. | Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga | Anggota |
| 7. | Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekeratriat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | Anggota |

IX. DINAS KESEHATAN

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Plt. Kepala Dinas Kesehatan | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekeratris Dinas Kesehatan | Ketua |
| 3. | Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Anggota |
| 8. | Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan | Anggota |
| 9. | Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan | Anggota |
| 10. | Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan | Anggota |

X. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Ketua |
| 3. | Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Bina Marga | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Sumber Daya Air | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Tata Ruang | Anggota |
| 8. | Perencana Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Anggota |
| 9. | Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Anggota |

XI. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Ketua |
| 3. | Perencana Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Sekretaris |
| 4. | Kapala Bidang Perumahan | Anggota |
| 5. | Kapala Bidang Permukiman | Anggota |
| 6. | Kapala Bidang Pertanahan | Anggota |
| 7. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| 8. | Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Anggota |

XII. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja | Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | Anggota |
| 4. | Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Personil | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Pemadam Kebakaran | Anggota |

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 8. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| 9. | Kepala Sub Bagian Keuangan | Anggota |
| 10. | Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan | Anggota |
| 11. | Pelaksana pada Bagian Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| 12. | Pelaksana pada Bagian Keuangan | Anggota |

XIII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Ketua |
| 3. | Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Sekretaris |
| 4. | Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik | Anggota |
| 5. | Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Anggota |
| 6. | Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Anggota |

XIV. DINAS SOSIAL

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Kepala Dinas Sosial | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Sosial | Ketua |
| 3. | Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial | Anggota |
| 7. | Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Sosial | Anggota |

XV. DINAS TENAGA KERJA, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian | Ketua |
| 3. | Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Hubungan Industrial | Anggota |

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 6. | Kepala Bidang Perindustrian | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Perdagangan | Anggota |
| 8. | Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian | Anggota |

XVI. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Ketua |
| 3. | Perencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana Ketahanan, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Perlindungan Anak | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Perlindungan Perempuan | Anggota |
| 8. | Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Anggota |

XVII. DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Kepala Dinas Pangan dan Pertanian | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian | Ketua |
| 3. | Perencana Ahli Muda pada Dinas Pangan dan Pertanian | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Perkebunan | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Prasarana Sarana Penyuluhan | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | Anggota |
| 8. | Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan | Anggota |
| 9. | Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan | Anggota |
| 10. | Pengadministrasian Perencanaan dan Program | Anggota |

XVIII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup | Ketua |
| 3. | Perencana pada Dinas Lingkungan Hidup | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Penataan Lingkungan | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | Anggota |
| 8. | Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup | Anggota |

XIX. DINAS PERHUBUNGAN

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Kepala Dinas Perhubungan | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Perhubungan | Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan | Anggota |
| 6. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| 7. | Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan | Anggota |

XX. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Ketua |
| 3. | Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan | Anggota |
| 8. | Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Anggota |

XXI. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Fasilitasi Administrasi Pemerintah Desa | Anggota |
| 7. | Penggerak Swadaya Masyarakat | Anggota |
| 8. | Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Anggota |

XXII. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | Ketua |
| 3. | Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang E-Government | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Persandian | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Statistik | Anggota |
| 8. | Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekeratriat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | Anggota |

XXIII. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN, KOPERASI DAN UKM

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM | Ketua |
| 3. | Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Penanaman Modal | Anggota |

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 5. | Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Pelayanan | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Data dan Informasi | Anggota |
| 8. | Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM | Anggota |

XXIV. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | Ketua |
| 3. | Perencana Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Pengelolaan Arsip | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan | Anggota |
| 7. | Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | Anggota |
| 8. | Pustakawan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | Anggota |
| 9. | Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | Anggota |

XXV. DINAS PERIKANAN

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Kepala Dinas Perikanan | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Perikanan | Ketua |
| 3. | Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Perikanan Tangkap | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Perikanan Budidaya | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Pengolah dan Pemasaran | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Pengawasan Hasil Perikanan | Anggota |
| 8. | Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan / Mirzaban, S.Pi | Anggota |
| 9. | Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan / Ayu Annisa Fitri, S.Tr.Pi | Anggota |
| 10. | Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan / Achmad Maulana | Anggota |

XXVI. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Ketua |
| 3. | Kepala Bidang Destinasi Pariwisata | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Kebudayaan | Anggota |
| 7. | Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Anggota |

XXVII. KECAMATAN SUNGAILIAT

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Camat Sungailiat | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Kecamatan Sungailiat | Ketua |
| 3. | Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan | Sekretaris |
| 4. | Kepala Seksi Tata Pemerintahan | Anggota |
| 5. | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Anggota |
| 6. | Kepala Seksi Kesra, KB dan PP | Anggota |
| 7. | Kepala Seksi Trantibum | Anggota |
| 8. | Kepala Seksi Pelayanan Umum | Anggota |
| 9. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| 10. | Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan | Anggota |

XXVIII. KECAMATAN PEMALI

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Camat Pemali | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Kecamatan Pemali | Ketua |
| 3. | Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan | Sekretaris |
| 4. | Kepala Seksi Tata Pemerintahan | Anggota |
| 5. | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Anggota |
| 6. | Kepala Seksi Kesra, KB dan PP | Anggota |

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 7. | Kepala Seksi Trantibum | Anggota |
| 8. | Kepala Seksi Pelayanan Umum | Anggota |
| 9. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| 10. | Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan | Anggota |

XXIX. KECAMATAN MERAWANG

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Camat Merawang | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Kecamatan Merawang | Ketua |
| 3. | Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan | Sekretaris |
| 4. | Kepala Seksi Tata Pemerintahan | Anggota |
| 5. | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Anggota |
| 6. | Kepala Seksi Kesra, KB dan PP | Anggota |
| 7. | Kepala Seksi Trantibum | Anggota |
| 8. | Kepala Seksi Pelayanan Umum | Anggota |
| 9. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| 10. | Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan | Anggota |

XXX. KECAMATAN PUDING BESAR

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Camat Puding Besar | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Kecamatan Puding Besar | Ketua |
| 3. | Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan | Sekretaris |
| 4. | Kepala Seksi Tata Pemerintahan | Anggota |
| 5. | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Anggota |
| 6. | Kepala Seksi Kesra, KB dan PP | Anggota |
| 7. | Kepala Seksi Trantibum | Anggota |
| 8. | Kepala Seksi Pelayanan Umum | Anggota |
| 9. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| 10. | Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan | Anggota |

XXXI. KECAMATAN BAKAM

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Camat Bakam | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Kecamatan Bakam | Ketua |
| 3. | Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan | Sekretaris |
| 4. | Kepala Seksi Tata Pemerintahan | Anggota |
| 5. | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Anggota |
| 6. | Kepala Seksi Kesra, KB dan PP | Anggota |
| 7. | Kepala Seksi Trantibum | Anggota |
| 8. | Kepala Seksi Pelayanan Umum | Anggota |
| 9. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| 10. | Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan | Anggota |

XXXII. KECAMATAN MENDO BARAT

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Camat Mendo Barat | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Kecamatan Mendo Barat | Ketua |
| 3. | Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan | Sekretaris |
| 4. | Kepala Seksi Tata Pemerintahan | Anggota |
| 5. | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Anggota |
| 6. | Kepala Seksi Kesra, KB dan PP | Anggota |
| 7. | Kepala Seksi Trantibum | Anggota |
| 8. | Kepala Seksi Pelayanan Umum | Anggota |
| 9. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| 10. | Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan | Anggota |

XXXIII. KECAMATAN RIAU SILIP

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Camat Riau Silip | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Kecamatan Riau Silip | Ketua |
| 3. | Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan | Sekretaris |

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 4. | Kepala Seksi Tata Pemerintahan | Anggota |
| 5. | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Anggota |
| 6. | Kepala Seksi Kesra, KB dan PP | Anggota |
| 7. | Kepala Seksi Trantibum | Anggota |
| 8. | Kepala Seksi Pelayanan Umum | Anggota |
| 9. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| 10. | Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan | Anggota |

XXXIV.KECAMATAN BELINYU

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Camat Belinyu | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Kecamatan Belinyu | Ketua |
| 3. | Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan | Sekretaris |
| 4. | Kepala Seksi Tata Pemerintahan | Anggota |
| 5. | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Anggota |
| 6. | Kepala Seksi Kesra, KB dan PP | Anggota |
| 7. | Kepala Seksi Trantibum | Anggota |
| 8. | Kepala Seksi Pelayanan Umum | Anggota |
| 9. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| 10. | Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan | Anggota |

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Desember 2023

Pj. BUPATI BANGKA,

M. HARIS AR



**JADWAL TENTATIF TAHAPAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

| NO | TAHAPAN | WAKTU | KETERANGAN | PELAKSANA |
|-----------|--|---|--|---|
| 1 | SK Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja PD Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka | Minggu I Desember 2023 | | Bappeda, Seluruh PD, Bagian Hukum dan HAM Setda |
| 2 | Penyusunan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2025 | Minggu I Desember 2023 – Minggu I Februari 2024 | Dimulai paling lambat minggu pertama Desember tahun 2023 | Seluruh PD |
| 3 | Penyampaian Rancangan Awal Renja PD kepada Bappeda | 1 Februari 2024 | | Seluruh PD |
| 4 | Musrenbang Tk. Desa/ Kel | 10-31 Januari 2024 | | Dinpemdes, Desa/Kelurahan |
| 5 | Musrenbang RKPD Tk. Kecamatan | 5-8 Februari 2024 | Paling lambat minggu kedua Februari 2024 | Bappeda, Kecamatan, PD terkait |
| 6 | SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2025 | 12 Februari 2024 | Paling lambat minggu kedua bulan Februari 2024 | Bappeda |
| 7 | Penyempurnaan Ranwal Renja PD sesuai SE Bupati | 12 Februari-11 Maret 2024 | | Seluruh PD |
| 8 | Forum Perangkat Daerah (dilaksanakan oleh PD berkoordinasi dengan Bappeda) | 4-6 Maret 2024 | Paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Bupati diterima | Bappeda |
| 9 | Verifikasi Draft Rancangan Renja Perangkat Daerah oleh Bappeda dan Perbaikan oleh Perangkat Daerah | 1-18 Maret 2024 | | Bappeda dan Seluruh PD |
| 10 | Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten | 18 – 21 Maret 2024 | | Seluruh PD |
| 11 | Penetapan RKPD Kab. Bangka melalui Perbup | 2 Juli 2024 | Paling lambat 1 minggu setelah penetapan RKPD Provinsi | Bappeda, Bagian Hukum dan HAM Setda |
| 12 | Surat Sekda tentang penyempurnaan Ranhir Renja PD | 3 Juli 2024 | | Bappeda |
| 13 | Penyampaian Ranhir Renja PD kepada Bappeda | 3-11 Juli 2024 | Paling lambat 1 minggu setelah Perbup RKPD | Seluruh PD |
| 14 | Verifikasi Ranhir Renja PD oleh Bappeda dan Perbaikan oleh PD | 15-26 Juli 2024 | Paling lambat 2 minggu setelah penyampaian oleh PD | Bappeda dan Seluruh PD |
| 15 | Penyusunan Rancangan Perbup tentang Renja PD | 26-29 Juli 2024 | | Bappeda |
| 16 | Penetapan Renja PD melalui Perbup | 30 Juli 2024 | Paling lambat 1 bulan setelah penetapan Perbup RKPD | Bappeda, Bagian Hukum dan HAM Setda |